

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Kawasati, I. & R. (2017). *Metode Kualitatif*. 4(1).
- Rastra, P. (2017). *Pedoman Umum Subsidi Rastra*. 2017, 1–98.
- Subandi. (2017). Qualitative Description As One Method In Performing Arts Study. *Harmonia*, (19), 173–179.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Neo Positivisme- Positivisme- Post Positivism*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/utgex>
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pendit, Putu Laxman. (1992). “Makna Informasi: Lanjutan dari Sebuah *Perdebatan*,” dalam *Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangannya*, eds. Antonius Bangun dkk. Jakarta: Kesaint-Blanc.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.

### **Jurnal:**

- Syafriani Hanum. (2005) *Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) Oleh Perum Bulog Di Desa Kalongan Maguwoharjo, Yogyakarta*. [Repository.uin](http://repository.uin)
- Antika, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang*. Retrieved From [Http://repository.uinsu.ac.id/6056/1/SkripsiPdf.Pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6056/1/SkripsiPdf.Pdf)
- Framita, D. Y. (2020). Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Paper Knowledge. Toward A Media History Of Documents*, 12–26.

Hutasoit, P. R. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Pasar Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara. *Analisis Kesadahan Total dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di Pt Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara*, 44–48.

Abdullah, Khabib. Aditya Akbar Riadi dan Evanita. (2021). *Klasifikasi kelayakan Beras Menggunakan Metode Laplacian of Gaussian Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JURASIK)*. Volume 6 Nomor 2.

Janambani, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta*.

Kementerian Hukum Dan Ham. (2015). Peraturan Pemerintah Tentang Ketahanan Pangan. *Peraturan Pemerintah Tentang Ketahanan Pangan*, 8. Retrieved From [Http://Www.Bulog.Co.Id/Dokumen/Pp/Pp\\_17\\_2015\\_Kpg.Pdf](Http://Www.Bulog.Co.Id/Dokumen/Pp/Pp_17_2015_Kpg.Pdf)

Kurniawati. (2017). Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan di Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. In *Sc.Syekhnurjati.Ac.Id*. Retrieved From <Https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Munaqosah/1415203191.Pdf>

Kusuma, A. R. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (RASKIN) Di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. 5(2), 54–70.

Lucya, P. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan ( Pkh ) Di Kecamatan*.6(3), 63–72.

Maryana, N. (2011). *Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Di Kelurahan*

*Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.*  
From [Http://Www.Academia.Edu/3252593/Implementasi\\_Program\\_Beras\\_Miskin\\_RASKIN\\_Di\\_Kelurahan\\_Kabayan\\_Kec.\\_Pandeglang](http://Www.Academia.Edu/3252593/Implementasi_Program_Beras_Miskin_RASKIN_Di_Kelurahan_Kabayan_Kec._Pandeglang)

Nugroho, E., Aribowo, E., Studi, P., Informatika, T., Teknik, F., Universitas, I., & Dahlan, A. (2017). Sistem Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dengan Metode Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Informatika Ahmad Dahlan*, 2(2), 101882. <https://doi.org/10.26555/jifo.v2i2.a5253>

Panjaya, Y. H. (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN Di Kota Semarang (Studi Kasus: Di Kelurahan Pedurungan Kidul)*.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Sefiani, D. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 35–47.

Silitonga, R. F. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. 1–23.

Wati, I. (2020). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial*.

#### **Peraturan Presiden:**

Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan

## Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permenko Kesra No. 59 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat  
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi  
Undang-Undang No. 18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013

### **Peraturan Pemerintah:**

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan  
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang BULOG

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **Peraturan Desa:**

UU 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **WEB**

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/22/bulog-mencatatkan-telah-serap-1-juta-ton-beras-dari-petani-lokal?page=all>

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2020.html>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2754-per-maret-2021>

<https://bekasikab.bps.go.id/statictable/2020/10/06/302/jumlah-penduduk-kecamatan-cikarang-utara-menurut-jenis-kelamin-dan-desa-kelurahan-2011.html>

<https://w.w.wpresdenri.go.id/info-kementerian-lembaga/mensos-subsidi-rastra.html>

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-penduduk-miskin-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2025719/bulog-beberkan-alasan-kualitas-beras-RASKIN-masih-rendah>

<https://money.kompas.com/read/2021/03/18/164408926/beda-beras-premium-dan-medium-definisi-dan-cara-tahu-ciri-cirinya?page=all>

<http://www.bulog.co.id/beraspangan/rastra/sekilas-RASKIN-beras-untuk-rakyat->

miskin/